

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. STRATEGI POSITIONING POLITIK DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PADA PEMILU 2014 DI KOTA AMBON Johan Tehuayo	1-20
2. IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI PROVINSI MALUKU Joana J. Tuhumury	21-30
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 2 AMBON Said Lestaluhu	31-55
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KETAHANAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU Muhammad Taher Karepesina & Amir Faisal Kotarumalos	56-66
5. ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM TIMUR Sitti Nurjana Batjo	67-72
6. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KANTOR PEMBANTU REKTOR IV UT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA SOSIALISASI DAN PROMOSI DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA DI UPBJJ UT AMBON Muhammad Taher Karepesina	73-90
7. AKULTURASI PERILAKU KOMUNIKASI ANTAR ETNIS JAWA DAN ETNIS SERAM DI KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Selvianus Salakay	91-99
8. INVENTARIS BUDAYA MASYARAKAT ADAT (STUDI MASYARAKAT NEGERI SOYA) Prapti Murwani	100-115
9. KONFLIK PORTO HARIA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH (SUATU TINJAUAN PERSPEKTIF DALAM SOSIOLOGI) Sarmalina Rieuwpassa	116-134
10. PENGARUH REPUTASI DAN EKUITAS MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (STUDI PADA PRODUK HIGHT DAN LOW INVOLVEMENT) Amir Rumra	135-149

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KETAHANAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU

Taher Karepesina¹
Amir Faisal Kotarumalos²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan Lokal di Provinsi Maluku. Masalahnya adalah "Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Ketercukupan Pangan Lokal Di Provinsi Maluku?", Penelitian dilakukan dengan cara Purposive sampling melalui 60 orang yang dipilih dari berbagai stakeholder yakni Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Petugas penyuluh pertanian, Pejabat dan pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Pejabat dan pengawas Beras Miskin (Raskin) dari Bulog Divre Maluku/Maluku Utara, Pegawai balai pengkajian teknologi pertanian maluku dan para Petani. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sosialisasi kegunaan program ketahanan pangan lokal kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik sehingga warga masyarakat tidak mengerti akan manfaat dari kethanan pangan lokal, Pemerintah daerah jarang melibatkan aparatur terkait atau tenaga ahli penyuluhan pertanian dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan lokal di daerah ini, Pemerintah kurang menyediakan Bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa pupuk dan alat-alat pertanian kayakan tepada masyarakat untuk membudidayakan pangan lokal secara kontinyu, Bantuan modal lunak atau modal bergulir bagi petani pangan lokal jarang diberikan kapada masyarakat, Pendampingan bagi pengelolaan modal usaha pertanian panganlokal kurang berjalan intensif, Akses pasar kurang tersedia.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketahanan Pangan, Lokal

A. Pendahuluan

Sebelum terjadinya krisis moneter, Indonesia mengalami pernah mengalami kegagalan swasembada pangan yang berdampak pada rapuhnya ketahanan pangan secara nasional dan sangat berpengaruh pula pada kedaulatan pangan. Konsep kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah kemandirian dan hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan

¹ FISIP Universitas Terbuka, Ambon

² Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP, Univ. Pattimura, Ambon

ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka.

Secara nasional Indonesia adalah Negara agraris, dimana tumbuh dan berkembang dari sektor pertanian usaha utama mata pencaharian masyarakatnya. Pertanian tidak bisa dilepaskan dari masalah pangan, karena tugas utama pertanian adalah untuk menyediakan pangan bagi penduduk suatu Negara. Salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ketahanan pangan suatu negara secara yakni melalui angka rata-rata ketersediaan pangan.

Ditegaskan dalam UU/No 68/Tahun 2002 tentang ketahanan pangan bahwa: "Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman." Revolusi hijau (*green revolution*) adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia, (bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, padi, kentang, sagu). Jadi tujuan pokoknya adalah untuk mencukupi tanaman pangan penduduk. Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas (bimbingan masyarakat) adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut dilatarbelakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. namun oleh karena penyeragaman pangan ke beras maka menimbulkan dampak negatif berkurangnya keanekaragaman genetic jenis tanaman tertentu yang disebabkan oleh penyeragaman jenis tanaman tertentu yang dikembangkan dan ada sebagian daerah yang tidak berpotensi ditumbuhi tanaman padi (beras) seperti di Maluku.

Mengingat keragaman pangan merupakan bagian penting dari mutu pangan serta keragaman budaya dan status sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, maka terjadi keanekaan pula dalam konsumsi bahan makanan. Reformasi politik pangan bertujuan menciptakan rancang-bangun politik pangan yang lebih baik, sehingga melahirkan: "*Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.*"

Menurut BPS Provinsi Maluku (Maluku Dalam Angka 2010), Provinsi ini memiliki lahan pertanian padi seluas 21.252 Ha, dengan perincian 18.545 Ha lahan padi sawah dan 2.207 Ha lahan padi ladang. Dari lahan pertanian padi tersebut dihasilkan padi sebanyak 89.875 ton beras per tahun. Terdiri dari 83.764 ton padi sawah dan 6.111 ton padi ladang. Sedangkan kebutuhan beras untuk Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk 1.610.803 jiwa, dibutuhkan lebih

kurang 133 ton setiap tahunnya. Kekurangan beras untuk kebutuhan pangan masyarakat di provinsi Maluku cukup besar tersebut juga tidak mampu dipenuhi oleh Bulog Divre Maluku sebagai kaki tangan pemerintah sehingga seringkali mengimpor dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pangan beras. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berupaya sendiri untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat, salah satunya dengan pemberdayaan pangan berbasis lokal.

Tanaman Sagu, Jagung serta Umbi-umbian banyak tumbuh di Maluku, Sagu, jagung dan umbi-umbian diolah menjadi makanan bagi Masyarakat Maluku. Namun oleh karena manifestasi pemerintah dan modernisasi maka orang Maluku cenderung melupakan sagu, jagung serta umbi-umbian dan beralih ke beras. Padahal Maluku memiliki potensi yang besar sebagai lumbung pangan "sagu, jagung dan umbi-umbian itu" sebagai basis ketahanan pangan lokal dalam menghadapi krisis pangan. Sehingga dibutuhkan peran dan kinerja pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan makanan pokok itu sehingga memiliki kualitas pangan yang baik. Swasembada pangan harus tetap dijaga karena produksi pangan selain merupakan masalah ekonomi juga masalah politik.

Dalam mewujudkan kemandirian pangan di Maluku maka dikeluarkan Peraturan Daerah Maluku No 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Lembaga ini diharapkan menciptakan ketahanan pangan serta diversifikasi pangan di Maluku salah satunya dengan melindungi, melestarikan, serta mengolah sagu sebagai basis ketahanan pangan lokal di Maluku. Namun dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis pangan lokal, Badan Ketahanan Pangan Maluku masih mendapat kendala oleh karena paradigma masyarakat Maluku yang lebih memprioritaskan makan beras ketimbang pangan lokal Sagu, jagung dan umbi-ubian. Pergeseran pola konsumsi yang secara tidak sadar menciptakan ketergantungan terhadap beras, membuat masyarakat kurang termotivasi untuk menggali dan memanfaatkan pangan lokal. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi lambannya pengembangan penyediaan bahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (Badan Ketahanan Pangan) bersama masyarakat, dengan pangan lokal diharapkan Provinsi Maluku dapat menuju kemandirian pangan.

Terjadinya kasus busung lapar, sengketa beras miskin, sampai pada posisi terahir Maluku sebagai provinsi termiskin di Indonesia yang turut ditentukan oleh ketidakseimbangan antara *deret ukur dan deret hitungnya Maltus*, yang juga terkait dengan masalah kebutuhan pangan masyarakat. Pada sisi lain ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan local tidak lagi dikelola dengan baik oleh masyarakat dikarenakan terjadi perubahan pola makan, penduduk pada banyak daerah di Maluku telah mengalami perubahan pola makan dengan menempatkan sagu, jagung dan umbi-umbian pada deretan menu pokok ke dua setelah beras, kondisi ini dapat berdampak buruk pada situasi rawan pangan

ketika terjadi kelangkaan beras terutama pada kawasan pulau-pulau kecil yang jauh dan terisolir .

B. Permasalahan

Adapun permasalahan pokok yang diangkat guna dikaji di dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Ketercukupan Pangan Lokal Di Provinsi Maluku?"

C. Uraian Kepustakaan

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik Menurut Dye (1981:1) : "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: "*Public policies are those policies developed by government bodies and official*".

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Solihin (1991:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2010:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Bhattachrya (1997:43), menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Kartawinata, (1997:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*, *operational level*. Dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat

hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones dalam Widodo(1985:27) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: "*perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination*".

Widodo (1985:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu Perumusan kebijakan, Implementasi kebijakan serta Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

c. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pertanian

Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahap II 2010-2014 Kebijakan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 meliputi :

1. melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);
2. melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapangan guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di pedesaan;
3. pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, sayur dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
4. pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
5. peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;

6. peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
7. jaminan penguasaan lahan produktif;
8. pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
9. penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;
10. pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
11. penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
12. mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
13. pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
14. pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
15. pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
16. peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
17. peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
18. penguatan sistem perkarantina pertanian;
19. penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
20. pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
22. peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
23. peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.

Untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian selama periode 2010-2014, strategi yang akan ditempuh Kementerian Pertanian dilakukan melalui penerapan Tujuh Gema Revitalisasi, yaitu: (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan, (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya Kelembagaan Petani, serta Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani, (6) Revitalisasi (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian tersebut, menjadi acuan pada Strategi Badan Ketahanan Pangan dalam memfasilitasi program pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-2014.

D. Pembahasan.

a. Realitas Kebijakan

Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Di Provinsi Maluku yang dimaksudkan dalam penelitian ini sangat terkait dengan berbagai langkah terpadu, terarah dan terstruktur yang dilakukan dalam bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam rangka pengolahan areal pertanian guna mendesain peningkatan dan pemanfaatan hasil produksi Pertanian tanaman pangan bagi kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan ketahanan pangan lokal.

Penelitian ini dilakukan terhadap responden dari semua jajaran terkait yakni Badan Ketahanan Pangan, dinas pertanian yang terkait dengan program pemberdayaan petani serta seluruh petani yang berada pada kawasan pertanian Desa Waimital, Desa Waihatu Kabupaten SBB, Kawasan Pertanian Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Pertanian Pada Dataran Waeyapo Kabupaten Buru, dengan sampel penelitian sebanyak 60 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

a. Sosialisasi kegunaan program ketahanan pangan lokal kepada masyarakat

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku beserta instansi terkait jarang melakukan kegiatan sosialisasi program ketahanan pangan lokal kepada masyarakat, BKP-Maluku beserta lembaga terkait dalam kegiatan sosialisasi itu selalu menggunakan bahasa yang mudah kurang dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga warga masyarakat setempat kurang mengerti akan manfaat / kegunaan dari pangan lokal bagi kehidupan mereka.

b. Penyediaan Sumber daya aparatur, tenaga ahli penyuluh pertanian

Pemerintah daerah jarang melibatkan aparatur terkait atau tenaga ahli penyuluhan pertanian dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan lokal di daerah ini, aparatur terkait atau tenaga ahli penyuluh pertanian yang dilibatkan kurang memiliki kompetensi/memiliki

pengetahuan yang mendalam tentang tanaman pangan lokal daerah Maluku, oleh karenanya maka para petani kurang merasakan manfaat dari pendampingan aparatur terkait/para penyuluhan pertanian, berbagai program yang digalakan hanya berorientasi proyek yang bersifat temporal.

c. Bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa pupuk dan alat-alat pertanian

Pemerintah daerah kurang menyediakan pupuk guna mendukung pengembangan/budi daya tanaman pangan lokal di daerah ini, pemerintah daerah kurang menyediakan bantuan peralatan pertanian khusus tanaman pangan local (sagu, jagung dan umbi-umbian) kepada para petani setempat, serta pemerintah daerah juga kurang menyediakan pupuk guna mendukung pengembangan/ budi daya tanaman pangan lokal di daerah ini.

d. Bantuan modal lunak atau modal bergulir bagi petani pangan lokal

Bantuan modal lunak atau modal bergulir kepada para petani dalam rangka pengembangan tanaman pangan loka di daerah ini kurang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani, ahirnya para petani kurang merasakan kagunaan/manfaat dari bantuan modal yang diberikan.

e. Intensitas pendampingan bagi pengelolaan modal usaha pertanian pangan lokal

Pendampingan jarang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin intensitas pengelolaan modal usaha selalu dilakukan oleh para petani, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dirasakan kurang bermanfaat bagi para petani, kebijakan pemberian modal, pendampingan tenaga ahli, dan tenaga pendamping usaha yang disediakan pemerintah kurang membantu peningkatan usaha pertanian tanaman pangan local di daerah ini.

f. Penyediaan akses pasar bagi petani

Pemerintah daerah kurang membuka akses pasar yang luas bagi pemasaran tanaman pangan lokal bagi peningkatan kesejahteraan para petani, akses pasar yang tersedia, dirasakan kurang bermanfaat bagi peningkatan pendapatan para petani, dan ahirnya terjadi peningkatan kesejahteraan bagi para petani.

g. Perubahan pola makan masyarakat.

Pola makan pada masyarakat kita kurang mengalami perubahan yang signifikan. Sagu, jagung dan umbi-umbian kurang dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat, ketika terjadi kelangkaan distribusi beras di daerah ini masyarakat kurang merasa kenyang dalam mengkonsumsi pangan lokal.

h. Ketercukupan pangan lokal bagi masyarakat.

Stok pangan lokal di daerah ini, kurang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketika terjadi kelangkaan beras di pasaran.

E. Kesimpulan

Setelah dilakukan identifikasi data, pengumpulan, tabulasi, pengolahan, serta analisis data dari penelitian lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku beserta Instansi terkait jarang melakukan kegiatan sosialisasi program ketahanan pangan lokal kepada masyarakat, BKP-Maluku beserta lembaga terkait dalam kegiatan sosialisasi itu selalu menggunakan bahasa yang mudah kurang dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga warga masyarakat setempat kurang mengerti akan manfaat/kegunaan dari pangan lokal bagi kehidupan mereka. *Artinya bahwa sosialisasi terkait dengan pentingnya program Ketahanan pangan lokal kurang terlaksana dengan baik.*
2. Pemerintah daerah jarang melibatkan aparatur terkait atau tenaga ahli penyuluhan pertanian dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan lokal di daerah ini, aparatur terkait atau tenaga ahli penyuluh pertanian yang dilibatkan kurang memiliki kompetensi/memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tanaman pangan lokal daerah Maluku, oleh karenanya maka para petani kurang merasakan manfaat dari pendampingan aparatur terkait/para penyuluhan pertanian. *Artinya bahwa Penyediaan serta Pendayagunaan sumber daya aparatur/tenaga ahli kurang terlaksana dengan baik.*
3. Pemerintah daerah kurang menyediakan pupuk guna mendukung pengembangan/budi daya tanaman pangan lokal di daerah ini, pemerintah daerah kurang menyediakan bantuan peralatan pertanian khusus tanaman pangan lokal (sagu, jagung dan umbi-umbian) kepada para petani setempat, serta pemerintah daerah juga kurang menyediakan pupuk guna mendukung pengembangan/budi daya tanaman pangan lokal di daerah ini. *Ini berarti bahwa Bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa pupuk dan alat-alat pertanian kurang terlaksana dengan baik.*
4. Pemerintah daerah jarang memberikan bantuan modal lunak atau modal bergulir kepada para petani dalam rangka pengembangan tanaman pangan loka di daerah ini, bantuan modal lunak atau modal bergulir kurang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani, akhirnya para petani kurang merasakan kagunaan/manfaat dari bantuan modal yang diberikan. *Artinya pula bahwa Bantuan modal lunak atau modal bergulir bagi petani pangan lokal kurang dilaksanakan dengan baik.*
5. Pendampingan jarang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin intensitas pengelolaan modal usaha selalu dilakukan oleh para petani, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dirasakan kurang

bermanfaat bagi para petani, kebijakan pemberian modal, pendampingan tenaga ahli, dan tenaga pendamping usaha yang disediakan pemerintah kurang membantu peningkatan usaha pertanian tanaman pangan lokal di daerah ini, *yang berarti pula bahwa Intensitas pendampingan bagi pengelolaan modal usaha pertanian pangan lokal kurang dilaksanakan dengan baik.*

6. Pemerintah daerah kurang membuka akses pasar yang luas bagi pemasaran tanaman pangan lokal bagi peningkatan kesejahteraan para petani, akses pasar yang tersedia, dirasakan kurang bermanfaat bagi peningkatan pendapatan para petani, dan akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan bagi para petani. *Penyediaan akses pasar bagi petani kurang terwujud dengan baik.*
7. Kurang terjadi penyesuaian pola makan pada masyarakat kita, sagu, jagung dan umbi-umbian kurang dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat, ketika terjadi kelangkaan distribusi beras di daerah ini, di daerah ini masyarakat kurang merasa kenyang dalam mengkonsumsi pangan lokal ketika terjadi kelangkaan beras. *Penyesuaian pola makan masyarakat belum terwujud dengan baik.*
8. Kurang tersedia pangan lokal di daerah ini, stok pangan lokal di daerah ini, kurang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketika terjadi kelangkaan beras di pasaran, kemudian kurang terjadi peningkatan ketahanan pangan lokal, ketika terjadi kelangkaan beras di daerah ini. *Ketercukupan pangan lokal bagi masyarakat Maluku belum terwujud dengan baik.*

Artinya bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini yakni "Sejauh mana Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Di Provinsi Maluku?", selama ini masih belum terlaksana dengan baik.

F. Saran

Bertolak dari hasil analisis serta dengan mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang dapat diketengahkan adalah:

1. Sosialisasi terkait dengan pentingnya program Ketahanan pangan lokal perlu diintensifkan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.
2. Pemerintah daerah perlu menyediakan dan memberdayakan sumber daya aparatur/tenaga ahli dengan membangun kerja sama dengan pihak Universitas Pattimura yang memiliki pusat kajian sagu dan pangan lokal.
3. bahwa Bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa pupuk dan alat-alat pertanian harus diberikan dengan baik guna memotivasi para petani tanaman pangan lokal guna meningkatkan usah produksi pangan lokalnya.
4. Bantuan modal lunak atau modal bergulir bagi petani pangan lokal dilaksanakan dengan baik guna merubah pola bertani dari tradisional menjadi pertanian moderen yang menjanjikan.

5. Intensitas pendampingan bagi pengelolaan modal usaha pertanian pangan local harus pula dilaksanakan dengan baik, dengan mengarahkan petani untuk dapat mengelola modal dan bermental seving.
6. Penyediaan akses pasar bagi petani harus terbuka lebar .
7. Penyesuaian pola makan masyarakat harus dimulai dengan sosialisasi dan pameran-pameran pangan lokal.
8. Ketercukupan pangan lokal bagi masyarakat Maluku diwujudkan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pangan lokal.
9. Pangan lokal harus dikemas secara inovatif dan modern agar memiliki daya tarik sehingga masyarakat lebih tertarik mengkonsumsinya.
10. Data kuantitatif lahan dan produksi pangan lokal terutama sagu hendaknya di update 1 tahun sekali sebagai bahan perbandingan informasi terhadap ancaman alif fungsi lahan.
11. Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang pelestarian dan pengelolaan sagu harus dijadikan alat hukum yang tegas guna melindungi sagu sebagai pangan lokal masyarakat Maluku yang hamper menghilang dari selera makan orang Maluku ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattachrya, J.,1997, *Administrative Organization for Development*, HAS, Brussels.
- BPS Provinsi Maluku tahun 2010 dalam <http://Maluku.bps.go.id>. diakses pada tanggal 31 mei 2013 pukul 15.11 Wita
- BPS Provinsi Maluku tahun 2010 dalam <http://Maluku.bps.go.id>
- Dye,R.,Thomas, 1981 "*Understanding Public Policy*", New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Kartawinata Ade, 1997, Etika Kebijakan Publik (Makalah), Bandung : PPs. Ilmu Sosial Unpad.
- James E. Anderson, 1975, *Public Policy-Making*, New York, Preager S.
- Sumarsono, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nugroho, Rino, A. 2010. *Pengantar Teori Pembangunan*, Madina, Jakarta
- UU No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Daerah Maluku No 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Solihin A. Wahab,1991, Kebijakan Pemerintahan, Modul UT, Reineka Cipta, Jakarta.
- Widodo,1985, *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.